

Kasus penyelewengan dana desa oleh aparatur desa, seperti yang terjadi pada Ni Putu Ariyaningsih di Dauh Puri Klod, Denpasar Barat, menimbulkan stigma negatif pada peran aparat desa dalam menjalankan kewajibannya. Kasus korupsi dana SiLPA APBDes sebesar Rp 988 juta lebih mencuatkan tindakan memperkaya diri yang dilakukan oleh bendahara desa bersama rekan-rekannya. Kasus ini terungkap ketika terdapat selisih antara SILPA APBDes tahun 2020 dengan dana yang masih dipegang oleh mantan Perbekel, Bendahara, dan Kaur Keuangan. Kerugian negara yang ditaksir mencapai Rp 1,03 miliar menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Upaya pengembalian sebagian dana oleh beberapa tersangka masih belum mencakup seluruh kerugian yang terjadi.

Pada tahun 2023, data dari dpd.go.id menunjukkan bahwa selama tujuh tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, di mana 50% di antaranya adalah kepala desa. Untuk mengatasi penyelewengan dana desa, pemerintah secara aktif melakukan evaluasi aliran dana dan pemeriksaan di berbagai daerah, termasuk yang pernah mengalami masalah seperti Bali, Pulau Jawa, dan daerah lainnya. Upaya untuk meningkatkan transparansi dan *accountability* dalam pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh peran Sumber Daya Manusia (SDM) dan kepemimpinan. Seorang pemimpin, khususnya Kepala Desa, memiliki tanggung jawab utama atas seluruh aktivitas pemerintahan desa, termasuk pengelolaan dana desa. Peran kunci kepala desa dalam menciptakan pengelolaan dana desa yang akuntabel terletak pada kemampuannya untuk memotivasi dan membimbing karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Kepemimpinan yang terampil hasil dari pendidikan dan pengalaman membentuk individu tersebut. Keterampilan kepemimpinan yang memahami kepentingan masyarakat dan memiliki hubungan kerja sama yang baik dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perangkat daerah (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Selain kepemimpinan, faktor penting lain yang memengaruhi *accountability* Manajemen Dana adalah kompetensi aparatur desa. Kompetensi yang memadai dalam aparatur desa sangat penting untuk mencapai *accountability* yang baik (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019). Penelitian ini memperhatikan peran kunci kepemimpinan kepala daerah dalam membentuk kebijakan dan tindakan terkait keuangan daerah. Selain itu, penekanan diberikan pada kompetensi aparatur daerah, yang mencakup keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola keuangan dengan efektif. Selanjutnya, penelitian ini juga mempertimbangkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses Manajemen Dana pemerintahan daerah. Partisipasi ini dianggap sebagai elemen penting dalam mencapai tingkat

kompetensi berkontribusi terhadap peningkatan 0,376 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Koefisien regresi 0,618 untuk varbel partisipasi menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dalam varbel partisipasi berkontribusi terhadap peningkatan 0,618 dalam *accountability* Manajemen Dana daerah, dengan asumsi varbel lain konstan. Dengan demikian, persamaan ini memberikan gambaran tentang sejauh mana varbel independen dapat mempengaruhi varbel dependen dalam konteks *accountability* Manajemen Dana daerah.

Dengan nilai Adjusted R-square sebesar 0,544, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi memiliki kemampuan untuk menjelaskan sekitar 54,4% dari variasi dalam *accountability* Manajemen Dana. Sisanya, sekitar 45,5%, kemungkinan dipengaruhi oleh varbel lain yang tidak diteliti dalam lingkup penelitian ini. Hasil ini memberikan gambaran tentang sejauh mana variabilitas dalam *accountability* dapat dijelaskan oleh kombinasi ketiga varbel tersebut. Selanjutnya, nilai uji F sebesar 23,830 dengan signifikansi 0,000 (yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05) menunjukkan bahwa model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki kecocokan yang signifikan. Artinya, varbel kepemimpinan, kompetensi, dan partisipasi secara bersama-sama memberikan kontribusi yang signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Dengan demikian, hasil ini menguatkan kesimpulan bahwa model yang diusulkan memiliki daya penjelasan yang kuat terhadap *accountability* Manajemen Dana dalam konteks penelitian ini.

Pembahasan

Kepemimpinan kepala daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan kepala daerah memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Artinya, semakin baik kepemimpinan kepala daerah di setiap kantor daerah di Kecamatan Denpasar Barat, semakin baik pula *accountability* Manajemen Dana daerah tersebut. kepemimpinan kepala daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana" dapat dideskripsikan sebagai pernyataan yang menyoroti hubungan antara peran kepemimpinan seorang kepala daerah dan tingkat *accountability* dalam Manajemen Dana di suatu pemerintahan daerah. Deskripsi kalimat ini mengindikasikan bahwa fokus utama adalah bagaimana gaya atau kualitas kepemimpinan kepala daerah dapat mempengaruhi sejauh mana keuangan daerah dapat dipertanggungjawabkan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh (Pramayoga, I. B., & Ramantha, 2020), yang juga menyatakan bahwa kepemimpinan kepala daerah berpengaruh positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Peran kepemimpinan kepala daerah dianggap sangat penting dalam konteks Manajemen Dana daerah, mengingat kepala daerah bertanggung jawab dalam seluruh tahapan Manajemen

Dana daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Transparansi dan integritas kepala daerah dalam memimpin pemerintahan daerah dapat menciptakan lingkungan kerja yang disiplin dan dapat meningkatkan motivasi perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan kepala daerah sebagai langkah strategis dalam upaya mencapai *accountability* pengelolaan dana daerah yang lebih baik di Kecamatan Denpasar Barat.

kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi aparatur daerah memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. kompetensi aparatur daerah terhadap *accountability* Manajemen Dana," kita dapat membayangkan sebuah cerita tentang bagaimana tingkat keahlian dan kualifikasi dari aparat daerah memainkan peran penting dalam mengelola dana publik di tingkat lokal. Dalam sebuah daerah, aparat daerah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan dan prosedur keuangan, serta keterampilan teknis yang baik dalam pelaporan keuangan, dapat secara positif memengaruhi bagaimana dana daerah digunakan dan dipertanggungjawabkan. Mereka mungkin dapat merancang sistem Manajemen Dana yang efisien dan transparan, memastikan bahwa setiap keputusan keuangan didasarkan pada integritas dan tanggung jawab.

Sebaliknya, jika kompetensi aparatur daerah rendah, hal ini dapat mengakibatkan ketidakjelasan dalam Manajemen Dana, membuat sulit untuk memahami dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana daerah. Dalam cerita ini, kompetensi aparatur daerah menjadi faktor penentu dalam membentuk tingkat *accountability* Manajemen Dana di tingkat daerah tersebut. Artinya, semakin tinggi kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, semakin optimal dan akuntabel pengelolaan dana daerah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Prasetya, I. K. Y. B., Prayudi, M. A., & Diatmika, 2017) dan (Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, 2019), yang juga menyatakan bahwa kompetensi aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Manajemen Dana daerah. Kompetensi aparatur daerah melibatkan kemampuan, keterampilan, dan perilaku yang baik dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi aparatur daerah sebagai strategi untuk meningkatkan *accountability* dalam pengelolaan dana daerah. Oleh karena itu, upaya pengembangan sumber daya manusia di tingkat daerah, termasuk pelatihan dan pembinaan, dapat menjadi langkah efektif dalam mencapai tingkat kompetensi yang optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menunjukkan bahwa investasi pada pengembangan kompetensi aparatur daerah dapat memiliki dampak positif pada *accountability* Manajemen Dana daerah.. Hal ini termasuk dalam menjaga integritas, mencegah korupsi atau

penyelewengan dana, serta melaksanakan tugas dengan hati nurani. Kompetensi yang baik akan memberikan kontribusi positif terhadap optimalisasi Manajemen Dana daerah. Dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten, diharapkan Manajemen Dana daerah dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip *accountability*. Selain itu, kompetensi yang baik juga mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal. Aparatur yang kompeten dapat mengelola keuangan daerah dengan baik, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kualitas. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur daerah dianggap penting untuk mendukung pengelolaan dana daerah yang lebih baik dan optimal.

Partisipasi masyarakat terhadap *accountability* Manajemen Dana

Hasil analisis menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif signifikan terhadap *accountability* Manajemen Dana. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana daerah, semakin optimal pengelolaan dana tersebut. "partisipasi masyarakat terhadap *accountability* Manajemen Dana" membawa kita ke dalam gambaran mengenai bagaimana keterlibatan masyarakat secara aktif dapat membentuk tingkat pertanggungjawaban dan keterbukaan dalam pengelolaan dana publik. Dalam deskripsi kalimat ini, kita dapat membayangkan suatu konteks di mana partisipasi masyarakat memiliki dampak substansial pada cara keuangan pemerintahan daerah dikelola. Dampak dari partisipasi masyarakat ini tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menciptakan suatu lingkungan di mana informasi keuangan mudah diakses oleh warga daerah. Hal ini dapat memunculkan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga transparansi dan *accountability* dalam setiap keputusan keuangan yang diambil oleh pemerintahan daerah. Dalam konteks lokal daerah, partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam membentuk budaya demokratis dan melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan dan Manajemen Dana. Akibatnya, cerita ini menciptakan gambaran tentang bagaimana hubungan dinamis antara pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk praktik Manajemen Dana yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arta, I. M. A. S., & Rasmini, 2019), yang juga menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki positif terhadap *accountability* pengelolaan dana daerah. Partisipasi masyarakat mencerminkan tingkat keterlibatan aktif mereka dalam proses pembangunan daerah, mencakup peran mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penerimaan dan pemanfaatan hasil pembangunan. Hasil ini menegaskan bahwa melibatkan masyarakat secara langsung dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan *accountability* pengelolaan dana daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pentingnya mempromosikan partisipasi masyarakat sebagai elemen kritis dalam

